

**ANALISIS KENDALA PROYEK KONSTRUKSI YANG
DIKERJAKAN SECARA SWAKELOLA
DI KABUPATEN PINRANG**

TESIS

Oleh:

IRDAYANI

NPM : 2014831055

Pembimbing:

Dr. Sarwono Hardjomuljadi, Ir., M.T., M.H.

**PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL
KONSENTRASI MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI
KERJA SAMA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JANUARI 2017**



HALAMAN PERSETUJUAN
**ANALISIS KENDALA PROYEK KONSTRUKSI YANG
DIKERJAKAN SECARA SWAKELOLA DI KABUPATEN PINRANG**

Oleh :

**IRDAYANI
2014831055**

**Disetujui Untuk Diajukan Ujian Sidang Tesis pada Hari/Tanggal:
Rabu, 18 Januari 2017**

Pembimbing Utama:



Dr. Sarwono Hardjomuljadi, Ir., M.T., M.H.



**PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL
KONSENTRASI MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI
KERJA SAMA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JANUARI 2017**



**ANALISIS KENDALA PROYEK KONSTRUKSI YANG
DIKERJAKAN SECARA SWAKELOLA
DI KABUPATEN PINRANG**

**SIDANG UJIAN TESIS
Hari/Tanggal: Rabu/18 Januari 2017**

**IRDAYANI
NPM : 2014831055**

PERSETUJUAN TESIS

1. **Dr. Sarwono Hardjomuljadi, Ir., M.T.,M.H.**
Pembimbing



2. **Dr. A. Anton Soekiman, Ir., M.T., M.Sc.**
Penguji



3. **Amir Hamzah, S.T., M.T.**
Penguji



**PROGRAM MAGISTER TEKNIK SIPIL
KONSENTRASI MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI
KERJA SAMA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
JANUARI 2017**



PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Irdayani
Nomor Pokok Mahasiswa : 2014831055
Program Studi : Manajemen Proyek Konstruksi
Program Pascasarjana
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

**“ANALISIS KENDALA PROYEK KONSTRUKSI YANG
DIKERJAKAN SECARA SWAKELOLA
DI KABUPATEN PINRANG”**

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala risiko, akibat, dan/atau sanksi yang di jatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung
Tanggal : 11 Januari 2017



IRDAYANI

KENDALA PROYEK KONSTRUKSI YANG DIKERJAKAN SECARA SWAKELOLA DI KABUPATEN PINRANG

Irdayani (NPM : 2014831055)

Pembimbing Utama: Dr. Sarwono Hardjomuljadi, Ir., M.T., M.H.

Magister Teknik Sipil

Bandung

Januari 2017

ABSTRAK

Kegiatan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola dalam pelaksanaannya mengalami beberapa permasalahan/kendala, baik fisik maupun non fisik. Salah satu kendala yang dihadapi pada pelaksanaan fisik yaitu terlambat dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sehingga menyebabkan singkatnya waktu pelaksanaan. Sementara itu, rumitnya administrasi muncul sebagai kendala lain terkait pelaksanaan pekerjaan non fisik. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi faktor kendala dominan beserta usulan rekomendasi solusi yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode *Relative Important Index* (RII) diperoleh 6 faktor kendala yang dikategorikan setuju dan dominan dengan nilai $RII \geq 0,710$. Kendala tersebut diantaranya: 1) Adanya kebijakan dan politik tertentu dalam penentuan pelaksanaan pekerjaan, 2) Gangguan *external*, 3) Administrasi yang rumit, 4) Kurangnya kemampuan, pengetahuan dan kompetensi pelaksana swakelola, 5) Adanya *conflict of interest* dan 6) Biaya pengawasan terlalu rendah. Rekomendasi solusi untuk mencegah kendala tersebut dibutuhkan manajemen proyek berpengalaman dan kompeten, peningkatan pengawasan mulai awal sampai akhir pelaksanaan, proses pencairan yang lebih sederhana, peningkatan kompetensi SDM, dan sebaiknya Pemerintah Daerah membuat aturan di tingkat daerah tentang swakelola agar pelaksanaan swakelola lebih mudah, baik, efektif dan akuntabel.

Kata kunci: Kendala, Proyek Konstruksi, *Relative Importance Index* (RII), Swakelola

THE OBSTACLES OF IMPLEMENTING SELF-MANAGED CONSTRUCTION PROJECT IN PINRANG DISTRICT

Irdayani (NPM: 2014831055)

Advisor: Dr. Sarwono Hardjomuljadi, Ir., M.T., M.H.

Magister of Civil Engineering

Bandung

January 2017

ABSTRACT

Construction activities are carried out in self-managed implementation faced some problems / obstacles, both physical and non-physical. One of the obstacles faced in the physical implementation is the delay in issuing the implementation guidelines and technical guidelines which impacting short implementation time. Meanwhile, the complicated administration becomes another constraint on the implementation of non-physical job. This study aims to identify the obstacle dominant factors along with the proposed recommendations. Based on the analysis using method Important Relative Index (RII) resulted 6 obstacle factors were categorized dominant and agree with RII value ≥ 0.710 . The obstacles consist of: 1) The specific policies and politics in determining the work execution; 2) External interference; 3) Complicated administrative; 4) The lack of ability, knowledge and competence of implementing self-management; 5) The conflict of interest; 6) The low supervision costs. Recommended solutions to prevent include these obstacles needed project management and professionals, increased scrutiny from early until the end of the implementation, the liquefaction process simpler, improving the competence of human resources, and Local Government should make rules about self-management at the local level for the implementation of self-management easier, better, effective and accountable.

Keywords: Obstacles, Construction Projects, Relative Importance Index (RII), Self-management

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “**Analisis Kendala Proyek Konstruksi Yang Dikerjakan Secara Swakelola Di Kabupaten Pinrang**”. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teknik pada Program Studi Magister Teknik Sipil Konsentrasi Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Atas selesainya penulisan Tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sarwono Hardjomuljadi, Ir., MT., M.H., selaku pembimbing, atas kesediaannya memberikan bimbingan, arahan dan masukan selama proses pembuatan Tesis ini selesai;
2. Bapak Dr. Anton Soekiman, MT., M.Sc., selaku Kepala Program Studi Magister Teknik Sipil Konsentrasi Manajemen Proyek Konstruksi, serta selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan arahan, dan masukan dalam penyusunan dan perbaikan Tesis ini;
3. Bapak Ir. Amir Hamzah, MT, selaku dosen penguji telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan dan perbaikan Tesis ini;
4. Seluruh dosen Program Studi Magister Teknik Sipil Konsentrasi Manajemen Proyek Konstruksi Universitas Katolik Parahyangan Bandung atas segala ilmu dan wawasan yang diberikan selama ini;
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pekerjaan Umum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan;

6. Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan, serta Bapak Kepala Bidang Jembatan, para Kepala Seksi dan seluruh Staf Dinas Pekerjaan Umum yang telah banyak membantu dalam dukungan data dan informasi;
7. Seluruh staf akademik dan para karyawan UNPAR atas bantuan dan kerjasamanya selama ini;
8. Kedua Orang Tua, serta keluarga yang selama ini memberikan motivasi serta doa yang senantiasa hadir di hati dalam menyelesaikan Tesis ini;
9. Suami saya tercinta Muh. Jafar, ST dan anak saya tersayang Fildzah Aura Latisha yang selalu memberikan cinta, pengorbanan, dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan Tesis ini;
10. Partner saya Siti Kautsariyah yang selama ini banyak membantu dan memberikan masukan dalam menyelesaikan Tesis ini;
11. Rekan–rekan seperjuangan karyasiswa Kementerian Pekerjaan Umum Magister Manajemen Proyek Konstruksi 2014 atas kerjasama dan dukunganya dalam proses pelaksanaan studi;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan serta keilmuan yang dimiliki, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sebagai masukan untuk penulisan selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandung, 18 Januari 2017

Irdayani

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PENGUJI	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Batasan Masalah.....	7
1.5. Metoda Penelitian.....	7
1.6. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Pengertian Proyek Konstruksi.....	9
2.2. Pengertian Kendala/ Hambatan.....	11
2.2.1 Penyebab Kendala/ Hambatan Proyek.....	12
2.3. Tinjauan Umum Swakelola.....	14
2.3.1 Pengertian Swakelola.....	14
2.3.2 Ketentuan Umum Swakelola.....	14
2.3.3 Metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	16
2.3.4 Prinsip-prinsip Dalam Pengadaan Barang/Jasa.....	18

2.3.5	Pihak-Pihak Penyelenggaraan Swakelola.....	19
2.3.5.1	Pelaksana Swakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran.....	22
2.3.5.2	Pelaksana Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain – Pelaksana Swakelola (IPL-PS).....	22
2.3.5.3	Pelaksana Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola(KM-PS)	23
2.4	Prosedur Pelaksanaan Proyek Swakelola.....	23
2.4.1	Tahap Perencanaan.....	24
2.4.2	Tahap Pelaksanaan.....	31
2.4.3	Tahap Pengawasan dan Evaluasi.....	35
2.5	Penelitian Terdahulu Tentang Swakelola.....	38
2.6	Peranan Statistika Dalam Penelitian.....	41
2.7	Teknik Pengambilan Sampel, Populasi dan Sampel.....	41
2.8	Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian.....	42
2.9	Pengujian Validitas dan Reliabilitas.....	45
2.10	Teknik Analisa Data.....	49
BAB III	METODE PENELITIAN.....	55
3.1	Kerangka Pikir Penelitian.....	55
3.2	Identifikasi Kendala Proyek Konstruksi Yang Dikerjakan Secara Swakelola.....	58
3.3	Penentuan Dan Kodefikasi Kendala-Kendala Proyek Konstruksi Yang Dikerjakan Secara Swakelola.....	60
3.4	Rancangan Instrumen Penelitian.....	64
3.5	Penentuan Jumlah Sampel.....	65
3.6	Uji Validitas dan Reliabilitas.....	65
3.7	Metode Pengolahan Data.....	66
3.8	Pendapat Ahli (<i>Expert Validation</i>).....	66

BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	67
4.1	Uji Validitas dan Reliabilitas.....	67
4.1.1	Uji Validitas.....	67
4.1.2	Uji Reliabilitas.....	68
4.2	Pengumpulan Data Penelitian.....	69
4.3	Deskripsi Data Umum Responden.....	70
4.3.1	Deskripsi Profil Responden (Berdasarkan Instansi Kerja).....	71
4.3.2	Deskripsi Pengalaman Responden.....	71
4.3.3	Deskripsi Jabatan Responden.....	72
4.4	Peringkat <i>Relative Importance Index</i> (RII).....	73
4.4.1	Peringkat Faktor Kendala Swakelola Berdasarkan Jawaban Responden Dinas Pekerjaan Umum.....	75
4.4.2	Peringkat Faktor Kendala Swakelola Berdasarkan Jawaban Responden Dinas PSDA.....	78
4.4.3	Peringkat Faktor Kendala Swakelola Berdasarkan Jawaban Responden Dispora.....	81
4.4.4	Peringkat Faktor Kendala Swakelola Berdasarkan Jawaban Responden Gabungan Tiap Dinas.....	85
4.5	<i>Expert Validation</i>	90
4.6	Pembahasan Peringkat RII Gabungan Tiap Dinas Penyebab Kendala Proyek Swakelola.....	94
4.6.1	Penyelesaian Pekerjaan Tergantung Kebijakan Yang Dilakukan.....	95
4.6.2	Gangguan External/ Pihak Lain Diluar Para Pihak	97
4.6.3	Administrasi Yang Terlalu Rumit.....	99
4.6.4	Kurangnya Kemampuan, Pengetahuan dan Kompetensi Pelaksana Swakelola.....	101
4.6.5	Adanya <i>Conflict Of Interest</i>	102
4.6.6	Biaya Pengawasan Terlalu Rendah Sehingga Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja.....	103

BAB V	PENUTUP	105
	5.1. Kesimpulan.....	105
	5.2. Saran.....	107
	DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR GAMBAR

NAMA GAMBAR		Hal.
Gambar	2.1 Penyelenggaraan Swakelola.....	18
Gambar	2.2 Struktur Organisasi Swakelola Oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran.....	22
Gambar	2.3 Struktur Organisasi Swakelola Oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola Bila Belum Ada ULP Pada IPL-PS.....	22
Gambar	2.4 Struktur Organisasi Swakelola Oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola Bila Sudah Ada ULP Pada IPL-PS.....	23
Gambar	2.5 Struktur Organisasi Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.....	23
Gambar	2.6 Tahapan Perencanaan Swakelola.....	24
Gambar	2.7 Tahapan Aktivitas Pengadaan Barang/Jasa Dengan Cara Swakelola.....	31
Gambar	3.1 Bagan Alir Penelitian.....	57
Gambar	4.1 Diagram Profil Responden.....	71
Gambar	4.2 Diagram Pengalaman Responden.....	72
Gambar	4.3 Diagram Jabatan Responden.....	73

DAFTAR TABEL

NAMA TABEL		Hal.
Tabel	1.1 Contoh Kasus Swakelola.....	5
Tabel	2.1 Pembentukan Tim Swakelola, Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga, serta Pembentukan Panitia Pengadaan....	30
Tabel	2.2 Mekanisme Pembayaran Pelaksanaan Swakelola.....	35
Tabel	2.3 Prosedur Pelaksanaan Proyek Swakelola.....	37
Tabel	2.4 Peringkat RII.....	51
Tabel	2.5 Ukuran Keisers-Meyers-Oklin.....	53
Tabel	3.1 Identifikasi Kendala Proyek Konstruksi Secara Swakelola....	58
Tabel	3.2 Penggabungan Kendala Proyek Konstruksi Secara Swakelola	61
Tabel	3.3 Pengelompokan dan Kodefikasi Kendala Proyek Konstruksi Secara Swakelola.....	63
Tabel	3.4 Skala <i>Likert</i>	64
Tabel	4.1 Output SPSS untuk Analisis Validitas Item dengan Teknik Corrected Item-Total Correlation.....	68
Tabel	4.2 Output SPSS untuk Pengujian Reliabilitas.....	69
Tabel	4.3 Sumber Data Pengumpulan Kuesioner.....	70
Tabel	4.4 Rincian Pengumpulan Kuesioner.....	70
Tabel	4.5 Peringkat RII.....	74
Tabel	4.6 Peringkat dan Nilai RII Kendala Swakelola Berdasarkan Jawaban Responden Dinas PU.....	75
Tabel	4.7 Hasil Peringkat dan Nilai RII Kendala Swakelola Berdasarkan Jawaban Responden Dinas PU.....	77
Tabel	4.8 Peringkat dan Nilai RII Kendala Swakelola Berdasarkan Jawaban Responden Dinas PSDA.....	79
Tabel	4.9 Hasil Peringkat dan Nilai RII Kendala Swakelola Berdasarkan Jawaban Responden Dinas PSDA.....	80
Tabel	4.10 Peringkat dan Nilai RII Kendala Swakelola Berdasarkan Jawaban Responden Dispora.....	82

Tabel	4.11 Hasil Peringkat dan Nilai RII Kendala Swakelola Berdasarkan Jawaban Responden Dsipora.....	83
Tabel	4.12 Hasil Peringkat dan Nilai RII Berdasarkan Jawaban Responden Gabungan.....	85
Tabel	4.13 Perbandingan Peringkat RII Dominan.....	87
Tabel	4.13 Hasil Rangkuman Validasi Ahli.....	91

DAFTAR LAMPIRAN

NAMA LAMPIRAN		Hal.
Lampiran 1	Kuesioner.....	113
Lampiran 2	Data Jawaban Responden Dinas Pekerjaan Umum.....	119
Lampiran 3	Data Jawaban Responden Dinas PSDA.....	120
Lampiran 4	Data Jawaban Responden Dispora.....	121
Lampiran 5	Data Jawaban Responden Gabungan.....	122
Lampiran 6	Data Hasil Perhitungan Uji Validasi dan Reliabilitas.....	125
Lampiran 7	Nilai rTabel.....	128

DAFTAR SINGKATAN

Perpres	:	Peraturan Presiden		
SDM	:	Sumber Daya Manusia		
K/L/D/I	:	Kementerian/Lembaga/Satuan Daerah/Institusi	Kerja	Perangkat
ULP	:	Unit Layanan Pengadaan		
UP	:	Uang Persediaan		
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen		
PA	:	Pengguna Anggaran		
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran		
IPL	:	Instansi Pemerintah Lain		
PS	:	Pelaksana Swakelola		
KM	:	Kelompok Masyarakat		
PJA	:	Penanggung Jawab Anggaran		
DAK	:	Dana Alokasi Khusus		
PU	:	Pekerjaan Umum		
PSDA	:	Pengelolaan Sumber Daya Air		
Dispora	:	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
KAK	:	Kerangka Acuan Kerja		
RAB	:	Rencana Anggaran Belanja		
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil		
IK	:	Indeks Kepentingan		
RII	:	<i>Relative Inportance Index</i>		
MSA	:	<i>Measure Of Sampling Adequacy</i>		
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah		
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pekerjaan konstruksi berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) Nomor 18 Tahun 1999 pasal 1 ayat (2) adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 1 ayat (15) pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Sedangkan menurut (Widiasanti 2013) proyek konstruksi merupakan proyek yang berkaitan dengan pembangunan suatu bangunan dan infrastruktur yang umumnya mencakup pekerjaan pokok yang termasuk dalam bidang teknik sipil dan arsitektur.

Dalam pelaksanaan suatu proyek, khususnya proyek konstruksi pemerintah, terdapat beberapa pihak yang terlibat. Pihak yang menawarkan jasa untuk melakukan pekerjaan pembangunan dikenal dengan istilah Penyedia Jasa, sedangkan pihak yang memberikan tugas disebut sebagai Pengguna Jasa (*Owner*). Kedua istilah tersebut sama-sama memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam melaksanakan kewajibannya.

Pengadaan barang/jasa Pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 khususnya pada pasal 6 dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui penyedia barang/jasa dan melalui swakelola. Dalam pemilihan penyedia

barang/jasa bisa dilakukan dengan empat metode yaitu pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Sedangkan swakelola itu sendiri adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi (K/L/D/I) sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

Jenis-jenis barang/jasa yang pengadaannya dapat dilakukan melalui swakelola yaitu pekerjaan yang telah memenuhi kriteria berdasarkan pada ketentuan pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Adapun jenis pekerjaan yang dimaksud, adalah sebagai berikut: (1) Pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM); (2) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat; (3) Pekerjaan yang tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; (4) Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu; (5) Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; (6) Pekerjaan untuk proyek percontohan dan survei yang bersifat khusus; (7) Pekerjaan survei, pemrosesan data, dan pengembangan sistem; (8) Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan; (9) Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri; (10) Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan (11) Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.

Proyek konstruksi yang ada di daerah umumnya ditangani dengan cara swakelola meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Penanganan kegiatan swakelola tersebut bisa dilakukan oleh K/L/D/I penanggung jawab

anggaran, instansi pemerintah lain maupun sekelompok masyarakat. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pasal 26.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya otonomi daerah yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka suatu daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri serta diberikan hak otonom untuk mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah. Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah dari 23 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, memiliki 12 Kecamatan meliputi 68 Desa dan 36 kelurahan. Untuk merealisasikan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019, maka di Kabupaten Pinrang menerapkan pola swakelola. Salah satu contohnya yaitu dalam melaksanakan pemeliharaan rutin jalan, Kabupaten Pinrang harus memiliki pola yang tepat dan disesuaikan dengan potensi serta sumber daya yang dimiliki daerah dalam melaksanakan otonomi. Apakah pola penanganan dengan sistem swakelola sudah merupakan pola penanganan yang tepat dan lebih efisien dibandingkan dengan sistem penyedia.

Kegiatan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola dalam pelaksanaannya mengalami beberapa permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak-pihak yang pernah terlibat pada proyek konstruksi dimana pengerjaannya dilaksanakan secara swakelola banyak terdapat kendala yang dihadapi baik fisik maupun non fisik. Salah satu kendala yang dihadapi pada pelaksanaan fisik yaitu terlambat dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berdampak pada sempitnya waktu pelaksanaan dan kendala pada

pelaksanaan pekerjaan non fisik salah satunya yaitu terlalu rumitnya administrasi pekerjaan swakelola. Oleh karena itu tiga tahun terakhir ini pekerjaan swakelola yang ada di Kabupaten Pinrang khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum yang awalnya dikerjakan secara swakelola oleh instansi sendiri dialihkan menggunakan penyedia barang/jasa atau dengan kata lain pihak kedua.

Permasalahan swakelola yang terpublikasi tidak terlalu banyak, namun sebenarnya dilapangan banyak terdapat permasalahan dan kendala baik dalam pelaksanaan maupun hasil akhir. Kegiatan proyek konstruksi secara swakelola juga sudah ada yang masuk ke ranah hukum bahkan penanggung jawabnya sendiri yang masuk bui¹. Contoh lain kegiatan swakelola yang sudah masuk ke ranah hukum terjadi pada Tahun Anggaran 2009 dan 2010, dimana Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sempat dilaksanakan dengan metode swakelola. Namun apa lacur kalau kemudian kebijakan ini menuai banyak masalah dan menelan korban. Selain masalah keterlambatan turunnya anggaran, soal terlambatnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berdampak pada sempitnya waktu pelaksanaan².

Seperti diakui di berbagai media publikasi, banyaknya penyimpangan dana DAK Pendidikan 2009 dan 2010 adalah karena minimnya pengetahuan dan kompetensi pelaksana swakelola, khususnya para Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab. Di sisi lain ada juga yang menyebutkan bahwa ini terjadi karena kelemahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis³.

¹ <http://koran.tempo.co/konten/2011/10/27/252830/KASUS-PROYEK-SWAKELOLA-PURidwan-Muhadir-Dituntut-5-Tahun-Penjara>, hari kamis tanggal 14 April 2016

² <http://samsulramli.com/waspada-swakelola-dak-pendidikan/>, hari senin 25 April 2016

³ Ibid, hal 1

Berikut beberapa permasalahan yang sudah sampai ke ranah hukum yang diambil dari berbagai sumber media, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1. Contoh kasus swakelola

No.	Permasalahan	Sumber
1.	Kasus proyek swakelola Dinas Pekerjaan Umum Makassar , terkait dugaan korupsi proyek swakelola tahun 2011 senilai Rp. 2 miliar.	http://koran.tempo.co/konten/2011/10/27/252830/KASUS-PROYEK-SWAKELOLA-PURidwan-Muhadir-Dituntut-5-Tahun-Penjara
2.	Kasus proyek swakelola Dinas PU dan SDA Kabupaten Bone Sul-Sel , terkait korupsi proyek swakelola pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tahun 2014 senilai Rp. 4 miliar lebih.	Ditulis oleh Andi Irfan, senin 9 Mei 2016. http://rakyatsulsel.com/kadis-pu-bone-8-jam-jalani-pemeriksaan-di-tipikor-polres.html
3.	Kasus proyek swakelola Dinas PU Jakarta Barat , terkait dugaan korupsi penyalagunaan dana swakelola pada pemeliharaan dan operasional infrastruktur pengendalian banjir. Dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan pertanggungjawaban laporan kegiatan maupun laporan keuangan mengingat terdapat pemalsuan dokumen seolah-olah telah dilaksanakan oleh pihak ketiga, tahun 2013 senilai 43 miliar.	Ditulis oleh Hariandialog, rabu 3 Mei 2016 http://www.hariandialog.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6776:kasus-korupsi-dana-swakelola-kejangung-kembali-tetapkan-11-tersangka&catid=35:politik-a-hukum&Itemid=2
4.	Kasus proyek swakelola Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende , terkait dugaan korupsi pengelolaan dana swakelola berupa pekerjaan fisik peningkatan ruas jalan yang tidak sesuai target maupun volume pekerjaan tidak sesuai rencana pada tahun 2013 senilai 1,13 miliar dan tahun 2014 senilai 950 juta.	Laporan Romualdus Pius, Senin, 11 Mei 2015 http://kupang.tribunnews.com/2015/05/11/kejari-naikan-status-dugaan-korupsi-dana-swakelola-di-pu-ende

Sumber : Data Hasil olahan

Apabila permasalahan kegiatan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka akan berdampak negatif lebih besar kedepannya. Untuk itu diperlukan upaya-upaya penanganan agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali pada masa yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas, maka tesis ini mengangkat judul “Analisis Kendala Pelaksanaan Proyek Konstruksi Yang Dikerjakan Secara Swakelola di Kabupaten Pinrang” .

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas, permasalahan yang akan diangkat pada Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja kendala pada pelaksanaan proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola;
2. Apakah kendala paling dominan pada pelaksanaan proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola;
3. Bagaimana rekomendasi solusi untuk mencegah atau mengurangi kendala pada pelaksanaan proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola.

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kendala pada pelaksanaan proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola di Kabupaten Pinrang;
2. Mengetahui kendala paling dominan pada pelaksanaan proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola;
3. Memberikan rekomendasi solusi untuk mencegah atau mengurangi kendala pada pelaksanaan proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola.

Berdasarkan tujuan diatas, diharapkan pada penulisan Tesis ini dapat memberikan manfaat berupa masukan positif bagi pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah khususnya pelaksanaan proyek swakelola, sehingga dapat mencegah atau mengurangi kendala-kendala yang dihadapi.

1.4 BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari tujuan penulisan, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Proyek konstruksi yang diteliti adalah proyek pemerintah yang dikerjakan secara swakelola dilihat dari sudut pandang pengguna jasa.
2. Penelitian ini hanya difokuskan pada daerah Kabupaten Pinrang dan dibatasi pada pelaksanaan 5 tahun kebelakang yaitu Tahun Anggaran 2011 - 2015.
3. Untuk memperoleh data penelitian, maka dilakukan wawancara dan pengisian kuesioner oleh responden yaitu dari pihak pemilik pekerjaan (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pinrang) dan pihak-pihak yang terlibat atau pernah terlibat pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola.

1.5 METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan membuat uraian secara jelas, sistematis dan terperinci mengenai fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisis untuk mendapatkan fakta-fakta yang diinginkan. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menggunakan sumber-sumber tertulis, wawancara kepada pihak-pihak yang pernah terlibat pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola, serta dengan menggunakan kuesioner untuk memperoleh data penelitian dari responden yang berdomisili pada wilayah penelitian (Kabupaten Pinrang).

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Tesis ini disusun dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, metoda penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka membahas mengenai kajian kepustakaan yang relevan serta beberapa teori atau konsep hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penulisan Tesis ini.

Bab III Metode Penelitian

Metode Penelitian menguraikan tentang model penelitian dan metode penelitian yang akan digunakan dalam pengumpulan data primer dan metode pengolahan data yang akan digunakan untuk analisa.

Bab IV Pengumpulan dan Analisa Data

Pengumpulan dan Analisa Data menguraikan tentang tahapan pengumpulan data, pengolahan dan analisa data.

Bab V Temuan dan Pembahasan

Temuan dan Pembahasan menguraikan tentang hasil temuan berdasarkan analisa data dan pembahasan oleh peneliti.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan Saran menguraikan tentang kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian serta saran untuk penelitian berikutnya.